

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul : “Peralihan Status Tanah Dari Hak Milik Menjadi Tanah Negara Berbasis Nilai Keadilan (Studi Tentang Pemberian Ganti Rugi Hak Atas Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Pemalang – Batang).”, bertujuan untuk mengetahui mengapa pembangunan Jalan Tol Pemalang - Batang belum berbasis keadilan dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Sosiologis*, spesifikasi penelitian, Deskriptif Analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara dan studi pustaka, analisis data dilakukan secara kualitatif, permasalahan dianalisis menggunakan teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Lokasi Penelitian di Kota Pekalongan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, menghasilkan pada pokoknya (1) penyebab terjadinya pembangunan jalan tol Pemalang Batang belum berbasis keadilan diantaranya yaitu masyarakat menganggap pihak Panitia Pengadaan Tanah kurang transparan dalam menentukan besaran nilai ganti rugi, adanya ketidakpastian dalam pengaturan dasar acuan yang dijadikan penilaian dalam pemberian ganti rugi, sehingga menimbulkan ketidakpastian juga yang dirasakan oleh warga terdampak,. (2) Beberapa solusi alternatif terhadap minimnya perlindungan hukum yang diterima oleh pemegang hak tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Tol Pemalang-Batang, yaitu musyawarah penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang diterima oleh pemegang hak atas tanah dilakukan secara transparan, sehingga keinginan pemegang hak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak menurut pemegang hak mendapat banyak perhatian dan mengenai bentuk serta besarnya ganti kerugian tetap panitia yang menentukan dan penolakan dari pemegang hak milik atas tanah mengenai besarnya ganti kerugian yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah diharapkan membawa kebaikan bagi pemegang hak atas tanah, Pemerintah perlu meninjau kembali aturan-aturan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga menjadi lebih sederhana namun tegas dan jelas, khususnya dalam hal penentuan besaran harga dalam pemberian ganti rugi, komitmen bersama antara pemerintah dengan pemilik tanah mengenai rencana pembangunan dapat diupayakan melalui penyusunan rencana pembangunan tol yang melibatkan masyarakat di masing-masing wilayah tentunya dengan transparan dan partisipatif.

Kata kunci : Peralihan status tanah hak milik, tanah negara, ganti rugi

## ABSTRACT

*The research entitled: "The Transition of Land Status from Property into State Land Based on Value of Justice (Study of Granting of Compensation for Land Rights for the Construction Project of Pemalang - Batang Toll Road).", Aims to find out why the construction of Pemalang - Batang Toll Road has not been based on justice and provide solutions to these problems.*

*This study uses the Sociological Juridical approach, research specifications, Descriptive Analytical, the data used are primary data and secondary data. Data were obtained by interview and literature study, data analysis was carried out qualitatively, problems were analyzed using justice theory, legal certainty theory and authority theory. Research Location in Pekalongan City.*

*Based on the research that the researchers did, basically (1) the cause of the construction of Pemalang Batang toll road has not been based on justice, among others, the community considers the Land Procurement Committee to be less transparent in determining the amount of compensation, the uncertainty in the basic reference arrangements used as an assessment in the compensation, causing uncertainty also felt by affected people. (2) Some alternative solutions to minimum legal protection received by land rights holders in land acquisition for the construction of Pemalang-Batang Toll Road, namely deliberation on the determination of the form and amount of compensation received by holders of land rights are carried out transparently, so the desirability of the right holder to obtain appropriate compensation according to the rights holder gets a lot of attention and regarding the form and amount of compensation remains the committee that determines and refusal of holders of land rights regarding the amount of compensation determined by the land acquisition committee is expected to bring good to the right holders on land, the Government needs to review the rules in land acquisition for the public interest so that it becomes simpler but firm and clear, especially in terms of determining the price in compensation, joint commitment between the government and the land owner regarding the development plan can it be pursued through the formulation of toll development plans that involve the community in each region, of course with transparency and participation.*

*Keywords: Transition of land ownership rights, state land, compensation*